



DOI:

Jurnal Ilmu Administrasi Publik

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma>

## Emas Merah Paniai : Kebijakan Pengembangan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal

Hiskia C. M. Sapioper<sup>1)</sup>, Ilham<sup>2)\*</sup>, Akhmad Kadir<sup>3)</sup>, Jackson Yumame<sup>4)</sup>, Sriyono<sup>5)</sup>, M. Zaenul Muttaqin<sup>6)</sup>, Usman Idris<sup>7)</sup>, Eka Patmasari<sup>8)</sup>

<sup>1'2'3'4'5'6)</sup>Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih, Indonesia

<sup>7)</sup>Prodi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih, Indonesia

<sup>8)</sup>Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Puangrimaggalatung Sengkang, Wajo, Indonesia

Disetujui: Agustus 2022; Direview: Agustus 2022 ; Diterima: Oktober 2022

### Abstrak

Potensi lokal kopi Paniai masyarakat setempat menganalogikan sebagai emas merah penyambung kehidupan, sebab kopi menjanjikan kesejahteraan yang dapat dipetik tanpa harus merusak alam sekitar. Pada kajian ini kemudian bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengembangan ekonomi kerakyataan dengan memanfaatkan potensi lokal kopi di Kabupaten Paniai, Papua. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan melakukan analisis teks dan wacana. Data diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Penyajian data dilakukan melalui beberapa tahapan; reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian terungkap bahwa bertani kopi bagi masyarakat Paniai merupakan bagian dari upaya merawat kearifan lokal dengan hidup berdampingan dengan alam sekitar. Berkebun kopi merupakan warisan leluhur yang dapat diturunkan ke generasi selanjutnya. Dalam mempertahankan budaya bertani kopi, Pemerintah Kabupaten Paniai tengah giat-giatnya mengembangkan potensi lokal yang ada. Adapun kebijakan pengembangan ekonomi rakyat melalui pengembangan potensi kopi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak seperti; pemerintah, masyarakat, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (Yapkema), dan akademisi. Selain itu, kebijakan pulang kampung membangun, gerakan tanam kopi, program kartu tani kopi, pembentukan koperasi, dukungan anggaran, penyediaan fasilitas pendukung, dan pelibatan pemerintah pusat, serta upaya pemasaran di berbagai event seperti G20 Nusa Dua Bali menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Paniai dalam melakukan pengembangan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal kopi Paniai.

**Kata Kunci :** Emas Merah; Kebijakan, Ekonomi Rakyat; Potensi Lokal; Kopi Paniai

### Abstract

*The local potential of Paniai coffee is analogous to the red gold that sustains life because coffee promises prosperity that can be reaped without destroying the surrounding environment. On This study then aims to determine the policy of developing the people's economy by utilizing the local potential of coffee in Paniai Regency, Papua. The type of research used is literature study by conducting text and discourse analysis. Data were obtained from various literature sources which were considered relevant to the research topic. The presentation of the data is carried out through several stages; data reduction, data presentation, data verification, and conclusion drawing. The results of the study revealed that coffee farming for the people of Paniai is part of an effort to maintain local wisdom by living side by side with the surrounding nature. Coffee gardening is an ancestral heritage that can be passed down to the next generation. In maintaining the coffee farming culture, The Paniai Regency Government is actively developing the existing local potential. The people's economic development policy through the development of coffee potential is carried out by involving various parties such as; the government, community, private sector, Non-Governmental organizations (Yapkema), and academia. In addition, the policy of returning home to build, the coffee planting movement, the coffee farmer card program, the formation of cooperatives, budget support, the provision of supporting facilities, and the involvement of the central government, as well as marketing efforts at various events such as the G20 Nusa Dua Bali are part of the efforts of the Paniai Regency government in developing the people's economy based on the local potential of Paniai coffee.*

**Keywords :** Red Gold; Policy, People's Economy; Local Potential; Paniai Coffee

**How to Cite:** Sapioper, H. C. M., Ilham., Kadir, A., Yumame, J., Sriyono., Muttaqin, M. Z., Idris, U., & Patmasari, E. (2022). Emas Merah Paniai : Kebijakan Pengembangan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal. *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, Vol. 10(2): 116-126

\*Corresponding author:

E-mail: [ilham@fisip.uncen.ac.id](mailto:ilham@fisip.uncen.ac.id)

ISSN 2549-9165 (Print)

ISSN 2580-2011 (Online)

## PENDAHULUAN

Kehadiran negara wajib memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Di Indonesia, kaitannya dengan kesejahteraan rakyat telah menjadi amanat konstitusi, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 “Memajukan Kesejahteraan Umum” sebagai salah satu tujuan negara. Berbicara mengenai pemajuan kesejahteraan rakyat juga ditegaskan pula dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) bahwa negara memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Dalam memajukan kesejahteraan rakyat, maka salah satu langkah yang dapat dilakukan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan masyarakat dalam mengangkat beragam potensi lokal yang ada. Seperti halnya di Kabupaten Paniai, Papua dengan potensi kopinya.

Pelibatan rakyat dalam bidang ekonomi begitu penting untuk dilakukan. Dimana sistem ekonomi kerakyatan membuka ruang keterlibat masyarakat, dalam hal ini adalah sistem yang memberdayakan rakyat. Sebagaimana Sabil, (2014) mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang dilaksanakan dengan adanya partisipasi rakyat untuk tujuan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pada prinsipnya pengembangan ekonomi rakyat adalah upaya mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh rakyat secara mandiri dengan pendekatan utamanya adalah adanya apresiasi terhadap kedaulatan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat, selanjutnya usaha memperkuat dan meningkatkan keberdayaan rakyat (Krisnamurthi, 2002). Mengenai pemajuan ekonomi kerakyatan sesungguhnya dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat lokal melalui pengembangan potensi yang ada berbasis kolaborasi multipihak.

Indonesia dikarunia begitu banyak berkah dengan beragam potensi atau kekayaan yang terkandung di dalamnya, mulai dari potensi kekayaan alam, budaya, kesenian, dsb. Melihat itu, *Founder sekaligus editor in*

*chief Good News From Indonesia/GNFI* Akhyari Hananto memandang ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif jika dikapitalisasi dengan baik yang terdegradasi maka kedepannya tidak hanya sebatas ekonomi kreatif akan tapi *everybody's economy* (Afrillia, 2021).

Indonesia memiliki banyak potensi kekayaan alam, salah satu potensi besar berupa hasil perkebunan kopinya. Merujuk Arifin & Ariyanto., (2018) sumber daya alam berupa kopi yang melimpah sudah seyogyanya dilihat secara mendalam sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal. Kopi memiliki peran terhadap ekonomi kreatif Indonesia, sebab adanya dukungan berupa potensi besar untuk dikembangkan dilihat dari variasi kopi serta kultur kopi Indonesia yang kini mulai dikenal secara internasional (Digdo, 2022).

Papua, sebagai bagian dari wilayah Indonesia memiliki keberagaman kekayaan sumber daya alam, mulai dari kekayaan sumber daya mineral logam; emas, tembaga, dan peraknya. Selain itu, Papua juga dikenal akan kekayaan alam berupa kopinya. Selaras, Hanok Herison Pigai selaku direktur Yapkema (Yayasan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat) mengatakan bahwa kopi Papua merupakan potensi yang begitu luar biasa, olehnya itu, diharapkan dapat terus dikembangkan sehingga menjadi modal besar dalam menjaga alam Papua. Dimana alam memainkan peranan penting dalam kehidupan bagi orang Papua, mereka hidup berdampingan dengan alam, dirawat dan dijaga berdasarkan kearifan lokal yang diwariskan secara turun temurun.

Paniai merupakan salah daerah yang ada di Provinsi Papua, daerah ini berada dalam wilayah adat Meepago. Bagi masyarakat Paniai, Kopi dianalogikan sebagai emas merah penyambung kehidupan. Komoditas emas merah Paniai dianggap sebagai suatu anugerah Tuhan yang kini menjadi harapan masyarakat setempat. Merujuk Sarwan, (2020) alasan kopi disebut sebagai emas merah, sebab dapat dipetik dan dipanen untuk tujuan pemenuhan ekonomi keluarga tanpa harus merusak alam sekitar. Kopi merupakan salah satu produk

unggulan Papua, salah satunya berada di Kabupaten Paniai. Bahkan daerah ini dikenal sebagai penghasil kopi arabika terbaik yang didukung oleh beberapa faktor seperti; letak geografis, iklim dan luasan area, bahkan kopi Paniai dikenal hingga Eropa (You, 2021). Olehnya itu, potensi kopi ini mesti dikelola secara maksimal untuk tujuan pengembangan ekonomi rakyat.

Kemudian dalam industri kreatif di era Otonomi Khusus (Otsus) Papua, maka Orang Asli Papua (OAP) diharapkan mampu menangkap setiap peluang yang ada, termasuk potensi unggulan seperti perkebunan kopi. Senada, Marit, (2019) mengatakan bahwa era Otsus ini diharapkan OAP mampu menangkap setiap peluang, seperti peluang usaha agar dapat lebih kreatif dalam rangka mempertahankan kearifan lokal akan produk unggulannya, dan melakukan kegiatan ekonomi yang diawali dengan mengolah input hingga ke output sehingga dapat memberi nilai tambah, termasuk mendorong OAP untuk terlibat dalam setiap kegiatan pembangunan. Dalam konteks ini, maka pemerintah memiliki peranan yang sangat penting.

Pembicaraan mengenai peran pemerintah, Sulastri & Dilastri, (2015) menguraikan peran utama pemerintah dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif, yakni; a) Pemerintah sebagai katalisator, fasilitator dan advokasi, kehadiran pemerintah dapat memberikan dorongan, dan rangsangan sehingga ide bisnis sehingga mampu bersaing pada tingkat yang lebih tinggi. Pemberian dukungan tersebut bisa berupa komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan administrasi publik yang baik, disamping memberikan support berupa bantuan insentif, finansial, maupun proteksi, b) Pemerintah sebagai pengambil kebijakan, maka setiap keputusan yang dihasilkan memiliki kaitan dengan rakyat, institusi, intermediasi, industry, sumber daya serta teknologi. Pengembangan ekonomi kreatif dapat dipercepat ketika pemerintah mampu melahirkan setiap kebijakan yang dikeluarkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif terhadap industri kreatif, c) Pemerintah sebagai investor, konsumen, bahkan dapat bertindak sebagai *entrepreneur*, selaku investor maka pemerintah harus mampu memberdayakan setiap aset-aset Negara agar lebih produktif kaitannya dengan

industri kreatif dan memiliki tanggung jawab terhadap investasi infrastruktur industry, d) Pemerintah sebagai urban planner, kreativitas dapat tumbuh subur ketika setiap kota memiliki iklim kreatif. Olehnya itu, perlu diciptakan kota-kota kreatif agar pengembangan ekonomi kerakyatan dapat berjalan dengan baik, kota kreatif ini dapat menjadi magnet atau sebagai penarik para pelaku usaha untuk membuka usaha di Indonesia.

Selanjutnya, kaitannya dengan upaya pengembangan potensi lokal kopi Papua, Samsul, dalam Marit, (2019) mengajukan strategi kebijakan pemberdayaan yang ditujukan kepada Orang Asli Papua (OAP) dalam dunia ekonomi kreatif di era Otonomi Khusus (Otsus) Papua yakni; memberdayakan pengusaha orang asli Papua, menyediakan sarana pendukung ekonomi berupa fasilitas pasar khusus yang diperuntukkan terhadap orang asli Papua, menyediakan lahan dengan dukungan fasilitas yang memadai, memberikan kemudahan dalam mendapatkan modal usaha melalui kredit lunak yang diberikan oleh perbankan atau lembaga penjamin keuangan yang telah disediakan oleh pemerintah setempat, dan pembentukan atau penyediaan lembaga penjamin keuangan di tingkat kampung.

Berangkat dari uraian diatas, maka kajian ini bertajuk “Emas Merah Paniai : Kebijakan Pengembangan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal”. Kajian ini bertujuan untuk menguraikan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka pemanfaatan potensi lokal kopi dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis masyarakat di kawasan pegunungan Papua, khususnya Kabupaten Paniai, Provinsi Papua.

#### **METODE PENELITIAN**

Adanya metode yang digunakan merupakan suatu keniscayaan dalam melangsungkan suatu kegiatan penelitian. Berangkat dari hal tersebut, maka kajian ini dilakukan dengan memanfaatkan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Kajian kepustakaan ini merupakan bagian dari penelitian kualitatif, hanya saja dalam penelitian kepustakaan tidak dilakukan kegiatan wawancara dan observasi akan tetapi dilakukan analisis teks dan wacana dengan memindahkan *setting* lapangan ke dalam

ruang perpustakaan (Hamzah, 2020). Jenis penelitian perpustakaan tersebut memiliki akar filosofis *postpositivisme* yang kuat, bersifat komprehensif, *holistic*, lengkap dan menyeluruh (Hadi; Hamzah, dalam Ilham et al., 2022). Merujuk Synder, dalam Pringgar (2020) dikatakan bahwa jenis penelitian perpustakaan dihadapkan langsung pada data atau teks yang disajikan bukan pada data lapangan atau dengan kata lain jenis penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan atau data-data siap pakai serta data sekunder yang digunakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber pustaka, seperti; jurnal, prosiding, buku, skripsi, thesis, disertasi, surat kabar, laporan, *platform online*, dan sumber lainnya yang dianggap relevan dengan topik kajian. Adapun tahap analisis data dilakukan melalui sejumlah tahapan; reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan akhir (Miles & Huberman, dalam Ilham et al., 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Kebijakan Publik, Ekonomi Rakyat, dan Potensi Lokal

#### 1) Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan segala proses yang diambil pemerintah dalam rangka melakukan pemecahan terhadap permasalahan tertentu untuk tujuan kepentingan umum (Sunarti, 2016). Merujuk Thomas R. Dye yang dikutip oleh Wirano dalam Dewi, (2017) dikemukakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang telah dipilih oleh pemerintah dan kemudian dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. Paradigma kebijakan publik yang responsif serta membuka peluang bagi masyarakat agar dapat berkembang secara mandiri dalam proses implementasi, formulasi begitu juga dengan evaluasi kebijakan sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Sururi, 2016).

#### 2) Ekonomi Kerakyatan

Konsep kesejahteraan rakyat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan konsep ekonomi kerakyatan, dimana kedua konsep ini secara eksplisit dan implisit dapat ditemui dalam

konstitusi negara, yakni pada Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, dalam Pasal 33 dijelaskan mengenai sistem perekonomian nasional Indonesia yang ditujukan untuk memajukan kesejahteraan sosial (Hosein, 2016). Penjelasan yang dimuat dalam Pasal 33 tersebut sejatinya telah mencerminkan dasar ekonomi kerakyatan, yakni produksi yang dilakukan dengan melibatkan semua pihak, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemeliharaan setiap anggota yang berpangkal terhadap terciptanya kemakmuran bagi rakyat dan bukan semata untuk kemakmuran individu tertentu (Suma, 2014 : 46).

Merujuk Baswir, (2016) ekonomi kerakyatan didefinisikan sebagai suatu struktur dan proses ekonomi yang berkeadilan dan demokratis dengan mendorong pelibatan rakyat banyak sebagai pemilik modal dan pengendali dalam menjalankan roda perekonomian. Dalam bunga rampai berjudul "Ekonomi Kerakyatan" Baswir., (2014 : 33) juga mengatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan (*democratic economic system*) merupakan sebuah struktur dan proses ekonomi dengan berusaha memindahkan kedaulatan ekonomi (*power to control*) dari oligarki dari para pemodal ke tangan seluruh rakyat. Dalam Konvensi *International Labour Organization* (ILO) ke-169 tahun 1989 dijelaskan bahwa ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi tradisional merupakan suatu pondasi bagi masyarakat lokal guna mempertahankan kehidupannya, definisi ini dikembangkan dengan didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan pengetahuan masyarakat lokal dalam rangka mengelola kehidupan serta lingkungannya (Ahmad, 2021). Konsep ekonomi kerakyatan menjadi salah satu instrumen dalam sistem perekonomian di Indonesia yang digagas oleh negarawan dan ekonom Indonesia Mohammad Hatta yang akrab disapa Bung Hatta (Moh. Musfiq, 2021). Secara makro, praktek-praktek ekonomi rakyat mengacu pada ekonomi pancasila (Jokow, 2020). Menyebutkan bahwa ekonomi pancasila dengan mudah dapat dikenali dan ditemui di Indonesia yang dalam prakteknya sering juga disebut dengan ekonomi rakyat yang bersifat demokratik, moralistik dan mandiri (Rahardjo, 2004).

Pengembangan ekonomi kerakyatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan segala potensi lokal daerah yang ada. Merujuk Hasmawati, (2018) pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal adalah suatu tatanan ekonomi, yang mana aset-aset ekonomi dalam sistem perekonomian nasional ditransfer kepada masyarakat banyak melalui sistem dengan menjadikan kekuatan ekonomi rakyat sebagai berbasis. Adapun tujuan dikembangkannya ekonomi kerakyatan adalah untuk memberikan peluang keterlibatan masyarakat yang berkaitan dengan bidang ekonomi, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga nantinya mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA) secara efisien dan berkelanjutan yang berpangkal terhadap pemajuan kesejahteraan rakyat (Ismail, 2015).

### 3) Potensi Lokal

Potensi adalah sebuah kemampuan yang dimiliki, dimana kemampuan tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah kekuatan yang lebih besar. Sementara itu, potensi lokal menurut Endah, (2020) adalah kemampuan yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kendati demikian, persoalan yang terkadang muncul adalah minimnya pemanfaatan potensi lokal dalam menjawab persoalan kaitannya dengan pemajuan kesejahteraan rakyat (Ilham et al., 2020).

#### Potensi Lokal Kopi Paniai

Paniai merupakan bagian dari wilayah adat Meepago. Di Provinsi Papua sendiri terdapat 5 (lima) wilayah adat, yakni; Mamta/Tabi, Saereri, Anim Ha, La Pago, dan Meepago. Kaitannya dengan potensi kopi, wilayah adat Meepago dikenal karena merupakan salah satu penghasil kopi arabika terbaik, salah satunya berada di wilayah Kabupaten Pania (You, 2021).

Kopi bagi masyarakat Kabupaten Pania menganalogikan sebagai "Emas Merah" sebab bernilai rupiah yang dapat dipetik tanpa harus merusak alam sekitar. Senada, Nawipa et al., (2022) mengatakan bahwa kopi bagi masyarakat Paniai disebut sebagai emas merah yang dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat tanpa menyebabkan pertikaian serta mudah didapatkan dengan cara dipetik. Bertani kopi merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam artikel yang berjudul "Cerita Tiga Generasi Petani Kopi di Pania" seorang petani kopi Kristianus Kadepa menuturkan bahwa motivasi orang tuanya dulu

menanam kopi semata-mata karena perkebunan kopi dapat diwariskan dan dilanjutkan ke anak cucu mereka, kendati pada masa itu pemahaman akan potensi kopi seperti arabika dan strategi pengelolaannya masih minim (Ariane & Wulandari, 2020). Geliat pertanian kopi telah berlangsung lama, diperkirakan tahun 1950-an, sejak Irian Jaya masih berada dibawah penguasaan Belanda. Usai perang dunia ke-2 (dua) berlangsung, pemerintah Belanda bersama misionaris kemudian menggenjot kegiatan pembangunan di Papua, termasuk pengembangan di sektor perkebunan kopi, hasil dari produksi kopi inilah kemudian dijadikan sebagai minuman pengiring diskusi dinamika Papua oleh Ratu Wilhelmina dengan delapan pejabat asal Papua (Sarwan & Prasetyo, 2020).

Sejak tanah Papua menjadi bagian dari Indonesia. Perkebunan Kopi di Papua terus berkembang yang dijadikan sebagai salah satu sumber mata pencaharian bagi masyarakat, termasuk masyarakat Kabupaten Paniai. Sarwan & Prasetyo, (2020) mengatakan bahwa petani Kopi di Paniai memanfaatkan bibit yang berasal dari pegunungan Blue Mountains Jamaica, bibit ini termasyhur di seluruh dunia sebab menawarkan cita rasa yang ringan dengan tingkat keasaman yang halus, aroma bunga, dan hampir tak ada rasa pahit dalam setiap tegukan kopinya.

#### Kebijakan Pengembangan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Kopi Paniai

Dalam berbagai kesempatan Bupati Paniai Meki Nawipa menyampaikan tekadnya melahirkan petani kopi berdasi di daerah yang tengah dipimpinya. Tekad itu bukan sekedar wacana, melihat pengembangan kopi lokal di Paniai kini sedang giat-giatnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Paniai. Sejak tahun 2019, Pemerintah daerah Paniai telah mencanangkan sejumlah kebijakan, salah satunya melalui program penanaman satu juta pohon kopi, program tersebut kemudian memberikan dorongan moral bagi masyarakat petani kopi (Sarwan & Prasetyo, 2020). Lahirnya kebijakan "Gerakan Tanam Kopi" membuat masyarakat kembali melirik untuk kembali bertanam kopi sebab menjanjikan kesejahteraan, seiring dengan itu, bergairahnya pasar kopi di tingkat domestic menjadikan kopi asal Papua kini banyak diburu, bahkan para ahli kopi dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao

(Puslitkoka) dan praktisi perkopian dari *Sustainable Coffee Platform Indonesia (SCOPI)* telah berkunjung ke Paniai dan memberikan penilaian terhadap kopi arabika asal Papua dengan grade A yang cita rasa *excellent* (Defrizal, 2020).

Sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal kopi, Pemerintah Kabupaten Paniai menggandeng Yayasan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Yapkema) dengan melahirkan strategi Upaya Pengembangan Kopi Berbasis Masyarakat (UPKBM). Melalui strategi ini, membuka ruang keterlibatan dari berbagai pihak sebagai upaya menjamin pengembangan kopi Paniai. Selain itu, melalui UPKBM ini juga akan memberikan perlindungan terhadap kearifan lokal, khususnya di sektor kopi, mengingat budidaya kopi organic ini telah dilakukan secara turun temurun bagi mereka petani kopi yang masih aktif (Pigai, 2019).

Yapkema sebagai mitra Pemda Paniai bergerak dalam bidang pemberdayaan guna melahirkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Arifin & Ariyanto, (2018) menyebutkan kemandirian masyarakat dapat diwujudkan melalui kegiatan pemberdayaan dengan tujuan untuk mendorong dan meningkatkan kemampuan yang dimiliki masyarakat sehingga dapat lebih maju. Olehnya itu, Pigai, (2019) mengatakan dibutuhkan keseriusan dengan bekerja keras, bersinergi, melakukan pengawalan konsisten dan tentunya harus fokus sebagai syarat utama dalam mencapai keberhasilan, selanjutnya penyiapan bibit berkualitas, penyiapan sumber daya petani khususnya petani muda yang dibekali pengetahuan mulai tahap budidaya hingga pasca panen, dan penanaman sesuai target kaitannya dengan luas tanam dan jumlah pohon.

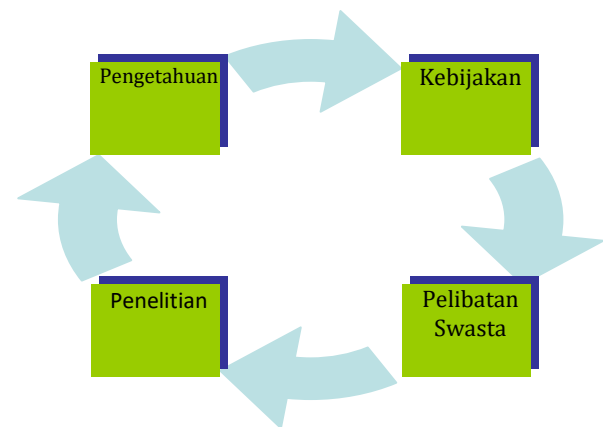
Melansir situs resmi Pemerintah Provinsi Papua, *papua.go.id*, (2019) Direktur Yapkema dan Master Trainer kopi tingkat nasional, Hanok Herison Pigai mengatakan bahwa pengembangan kopi lokal Paniai harus ada pelibatan dari berbagai pihak, seperti; Dinas Perkebunan dan Pertanian yang berperan penting di bagian hulu mulai dari tahapan penanaman hingga proses pasca panen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab pada bagian hilir mulai dari

pengolahan hingga pemasaran kopi siap saji termasuk cafe kopi, sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung memiliki peranan penting dalam menyiapkan dan memastikan adanya partisipasi masyarakat dalam pengembangan kopi.

Merujuk Yapkema, dalam Nawipa et al., (2022) beberapa strategi kerja yang diterapkan oleh Yapkema dalam upaya melakukan pengembangan kopi lokal di wilayah adat Meepago, termasuk di Kabupaten Paniai, yakni; Pengetahuan, Kebijakan, Pelibatan pihak swasta, dan Penelitian. Untuk lebih jelasnya disajikan pada gambar 1 berikut :

**Gambar 1. Strategi Kerja Pengembangan Kopi**

*Pengetahuan*; peningkatan pengetahuan petani kopi melalui kegiatan pelatihan, penyuluhan, seminar, dan lokakarya, serta melaksanakan studi banding. *Kebijakan*;



mendorong lahirnya kebijakan- kebijakan pemerintah dengan memprioritaskan pengembangan potensi unggulan daerah, seperti halnya potensi kopi lokal di Kabupaten Paniai, *Pelibatan Swasta*; memberikan dorongan dan kesempatan kepada pihak swasta (di wilayah Meepago) yang bertindak sebagai penyedia pasar seperti fasilitas pertanian, kredit kecil/modal usaha dalam upaya mendukung pengembangan budidaya pertanian dan perkebunan, dan *Penelitian*; melakukan kajian kaitannya dengan pengetahuan lokal.

Pemerintah Kabupaten Paniai juga menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB) Jawa Barat sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Paniai dalam melakukan pengembangan potensi lokal, termasuk kopi lokal Paniai (Mayor, 2021). Hal

ini dilakukan, mengingat pentingnya pelibatan akademisi dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Merujuk Sulastri & Dilastri, (2015) bahwa universitas dalam hal ini akademisi menjadi bagian dari cendekiawan yang memiliki 3 (tiga) bentuk peranannya, yakni; *pertama* peran pendidikan yang diarahkan untuk mendorong lahirnya generasi kreatif guna mendukung tumbuhnya karsa dan karya dalam industri kreatif, *kedua* peran penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan mengenai model kebijakan pengembangan industri kreatif termasuk instrumen yang dibutuhkan, begitu juga dengan teknologi yang mendukung pola kerja, pemanfaatan sumber daya yang efisien, serta menjadikan industri kreatif kompetitif, *ketiga* peran pengabdian agar membentuk masyarakat dengan institusi atau tatanan sosial guna mendukung tumbuh kembangnya industri kreatif nasional.

Pemerintah terus berupaya melakukan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan potensi lokal kopi. Pemberdayaan ekonomi rakyat juga di topang dengan Dana Kampung (Dana Desa) yang dikelola oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) milik masyarakat Paniai, dengan dana tersebut masyarakat kemudian diwajibkan menanam 2000 (dua ribu) pohon anakan kopi (Ohee, 2021). Kemudian, dengan dikeluarkannya kartu petani kopi merupakan salah bentuk komitmen dari Pemerintah Kabupaten Paniai dalam upaya mengembangkan budidaya kopi lokal. Kartu petani kopi telah terintegrasi dengan sistem perbankan dan aplikasi Pemda, melalui kartu ini dapat dimanfaatkan pula sebagai sarana untuk mengakses berbagai bentuk bantuan, seperti dana insentif petani, pupuk, mesin pertanian, pembiayaan, dsb (Pademme, 2021).

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Paniai kemudian melahirkan kebijakan “Pulang Kampung untuk Membangun”. Kebijakan ini dikeluarkan guna mengajak masyarakat untuk kembali membangun kampung halamannya, yang tentunya memiliki tujuan jangka panjang, yakni menghapus budaya ketergantungan yang selama ini menjadi masyarakat konsumtif sehingga perlu dilatih untuk memproduksi komoditas dari kampung secara mandiri, sehingga ekonomi rakyat berbasis potensi lokal dapat terbangun (Wagadei, dalam Nawipa et al., 2022).

Lebih lanjut, Nawipa et al., (2022) program unggulan dari kebijakan pulang kampung adalah program petani kopi, pemerintah mengajak masyarakat kembali membangun untuk bertani kopi, melalui program ini masyarakat yang bersedia akan diberikan kartu petani kopi dan diwajibkan menanam minimal 200 (dua ratus) pohon tanaman kopi. Sejak beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Paniai telah mengembangkan perkebunan kopi dengan luas tanam berkisar 4.552 hektare yang tersebar di 42 (empat puluh dua) distrik, setiap kebun ditanami berkisar 2 ribu pohon kopi, program ini melibatkan 432 (empat ratus tiga puluh empat) petani kopi (Pademme, 2021).

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Paniai juga mendirikan koperasi petani kopi, yang pengelolaannya dilakukan oleh anggota koperasi itu sendiri (Pademme, 2021). Koperasi tersebut kemudian dinamai Koperasi Harapan Baru. Kehadiran koperasi ini bukan hanya barang dan jasa yang dibarterkan akan tetapi akan mendorong ekonomi keaslian lokal untuk bersaing di tingkat nasional bahkan dapat dipasarkan ke dunia internasional (Yumai, 2021). Kaitannya dengan koperasi ini, semua petani kopi masuk atau terdaftar selaku anggota, sehingga nantinya dapat memberikan kemudahan kepada petani kopi dalam mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bersumber dari Pemerintah daerah (Mayor, 2021). Dengan dibentuknya koperasi tersebut, maka harapannya kemudian adalah setiap petani kopi dapat menghasilkan Rp.100.000 setiap harinya (Nawipa et al., 2022)

Setelah mendirikan koperasi petani kopi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paniai kemudian berencana membangun pabrik kopi, yang sebelumnya juga telah dibangun pengeringan kopi (*grand house*). Terkait hal ini, Bupati Paniai Meki Nawipa mengatakan bahwa pengembangan kopi harus didukung dengan penyediaan fasilitas, olehnya itu, pembangunan *grand house* telah dilakukan dan selanjutnya akan dibangun pula industrinya, seperti pabrik kopi yang mampu memproduksi berkisar 10 ton hingga 20 ton dengan mengedepankan kualitas sehingga dapat dinikmati oleh orang lain/penikmat kopi.

Dari segi pemasaran petani kopi diarahkan menjual hasil panen mereka di Yapkema selaku mitra utama Pemda Paniai dengan harga berkisar Rp. 80.000 tergantung

dari kualitas kopi, harga ini jauh lebih bagus jika dibandingkan sebelumnya yang hanya berkisar Rp.30.000-Rp.50.000, itupun harus ditumpuk di gudang sembari menunggu pembeli (Econusa, dalam Nawipa et al., 2022). Selain itu, Melalui koperasi harapan baru, pemerintah Kabupaten Paniai akan mendapat pendampingan dari Deputy Pengembangan Pembaruan Perkoperasian, Kementerian Perdagangan mulai dari hulu hingga hilir; salah satu bentuk pendampingan tersebut pada kegiatan pemasaran, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bernaung dalam koperasi tersebut akan mendapatkan pendampingan dari kementerian melalui Deputy Bidang Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka mengakomodir setiap unit usaha yang ada (Ohee, 2021). Selanjutnya, melalui event bergengsi internasional kegiatan presidensi G20 Nusa Dua Bali, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja Provinsi Papua juga telah mempersiapkan kopi Paniai sebagai salah satu produk unggulan yang akan dipamerkan pada kegiatan tersebut (Chairunnisa, 2022).

Berangkat dari diatas, penulis melihat jika upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Paniai telah senada dengan strategi kebijakan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) kaitannya dengan pengembangan kopi Papua dalam dunia ekonomi kreatif di era Otonomi Khusus (Otsus) Papua, sebagaimana yang diajukan oleh Samsul, dalam Marit, (2019). Selain itu, pemerintah Kabupaten Paniai dalam menjalankan perannya dalam upaya pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif juga telah senada dengan pendapat Sulastri & Dilastri, (2015), sebagaimana telah diuraikan di bagian awal tulisan ini.

## KESIMPULAN

Potensi lokal kopi Paniai masyarakat setempat menganalogikan sebagai emas merah penyambung kehidupan, sebab kopi menjanjikan kesejahteraan bagi rakyat yang dapat dipetik tanpa harus merusak alam sekitar. Bertani kopi bagi masyarakat Paniai merupakan bagian dari upaya merawat kearifan lokal dengan hidup berdampingan dengan alam sekitar. Alam bagi Orang Asli Papua ibarat Ibu yang memberikan kehidupan.

Selain itu, perkebunan kopi merupakan warisan yang dapat diturunkan ke generasi selanjutnya.

Kopi di Paniai telah ada sejak masa pendudukan Belanda di Papua. Setelah melalui pertarungan panjang Irian Barat, selanjutnya disebut Irian Jaya, kini Papua telah terintegrasi dengan Indonesia menjadi satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seiring dengan itu pula, geliat bertani kopi terus dikembangkan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah setempat dalam rangka mengembangkan potensi lokal kopi, seperti lahirnya program "Gerakan Tanam Kopi", menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yapkema dengan melahirkan strategi Upaya Pengembangan Kopi Berbasis Masyarakat (UPKBM). Termasuk pelibatan akademisi, dengan bekerja sama Institut Pertanian Bogor (IPB) turut dilakukan.

Pembentukan Koperasi harapan baru menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Hadirnya koperasi ini diiringi pula dengan lahirnya kebijakan melalui program Kartu Petani Kopi. Melalui kartu ini, para petani kopi diberikan kemudahan dalam mendapatkan kredit usaha rakyat yang bersumber dari pemerintah daerah. Kartu ini telah terintegrasi dengan sistem perbankan. Tak sampai disitu, kebijakan pulang kampung untuk membangun turut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Paniai dalam memaksimalkan pemanfaatan potensi lokal, melalui kebijakan ini masyarakat diajak untuk pulang kampung menanam kopi.

Untuk mendukung sejumlah kebijakan yang telah dikeluarkan. Penyediaan fasilitas seperti pembangunan pengeringan kopi (*grand house*) turut dilakukan, menyusul akan dibangun pula pabrik kopi. Selanjutnya, upaya pemasaran selain melibatkan Yapkema Pemerintah Kabupaten Paniai juga akan mendapatkan pendampingan langsung dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Event bergengsi G20 Nusa Dua Bali, kemudian dimanfaatkan sebagai momentum dalam memperkenalkan produk kopi lokal asal Paniai.



Sebagai catatan penutup, kebijakan pengembangan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal di Paniai sesungguhnya telah senada dengan strategi kebijakan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) kaitannya dengan pengembangan kopi dalam rangka mendukung ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif di era Otonomi Khusus (Otsus) Papua, seperti yang ditawarkan oleh Inosentius Samsul yang dikutip oleh Marit, (2019).

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, tim penulis menyampaikan terima kasih penulis kepada pengelola jurnal PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan tulisan ini. Dengan terbitnya tulisan ini semoga dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, serta menambah referensi kepada peneliti selanjutnya kaitannya dengan pengembangan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal kopi di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afrillia, D. (2021). *Kupas Tuntas Perkembangan Ekonomi Kreatif Indonesia dari Sisi Pemerintah dan Pelaku Usaha*. Goodnewsfromindonesia.id, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/10/13/kupas-tuntas-perkembangan-ekonomi-kreatif-indonesia-dari-sisi-pemerintah-dan-pelaku-usaha> (Diakses, 12 Agustus 2022).
- Akmad. (2021). *Pengertian Ekonomi Kerakyatan: Ciri, Prinsip dan Penerapan di Indonesia*. gamedia.com, <https://www.gamedia.com/literasi/ekonomi-kerakyatan/> (Diakses, 2 Oktober 2022).
- Ariane, Z., & Wulandari, D. (2020). *Cerita tiga generasi petani kopi di Paniai*. Jubi.co.id. <https://jubi.co.id/cerita-tiga-generasi-petani-kopi-di-paniai/> (Diakses, 11 Agustus 2022).
- Arifin, M., & Ariyanto. (2018). Desa Penghasil Kopi Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Damarwulan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 3(1), 19–31. <https://doi.org/10.26905/abdimas.v3i1.247>
- Baswir, R. (2014). Ekonomi Kerakyatan sebagai Sistem Indonesia. Dalam : Ridwan M, editor. *Ekonomi Kerakyatan*. Lembaga Suluh Nusantara Bekerjasama dengan American Institute For Indonesian Studies (AIFIS).
- Baswir, R. (2016). *Ekonomi Kerakyatan*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- Chairunnisa, N. (2022). *Nikmatnya Kopi Paniai Khas Papua yang Akan Dipromosikan dalam G20 Nusa Dua Bali*. Travel.Tempo.co. <https://travel.tempo.co/read/1592244/nikmatnya-kopi-paniai-khas-papua-yang-akan-dipromosikan-dalam-g20-nusa-dua-bali> (Diakses, 14 Agustus 2022).
- Defrizal, M. (2020). *Paniai Serious Kembangkan Kopi*. Beritasatu.com. <https://www.beritasatu.com/photo/38543/paniai-serious-kembangkan-kopi> (Diakses, 13 Agustus 2022).
- Dewi, R. (2017). Studi Kasus Penolakan Publik Atas Kebijakan Publik. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 5(1), 6–12. <https://doi.org/10.31289/publika.v5i1.1165>
- Digdo, I. A. (2022). *Peran Kopi Terhadap Ekonomi Kreatif di Indonesia*. Merahputih.com. <https://merahputih.com/post/read/peran-kopi-terhadap-ekonomi-kreatif-di-indonesia> (Diakses, 11 Agustus 2022).
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.
- Hadi, A. C. S. (2014). *Studi Kepustakaan Dalam Proses Penelitian* (A. Silo (ed.); 1st ed.). Uncen Press.
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan, Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian* (Edisi Revisi). Literasi Nusantara Abadi.
- Hasmawati, F. (2018). Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(5), 54–65. <https://doi.org/10.37064/jpm.v6i1.4986>
- Hosein, Z. A. (2016). Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945. *Jurnal*

- Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(3), 503–528.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.is3.art8>
- Ilham., Muttaqin, M. Z., Idris, U. (2020). Pengembangan Bumkam Berbasis Potensi Lokal Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. *Communnity Development Journal*, 1(2), 104–109.
- Ilham, I., Korwa, F. Y., Idris, U., & Muttaqin, M. Z. (2020). Analisis Potensi Dan Strategi Pengembangan Objek Wisata Pulau Asey Besar Danau Sentani Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 5(2), 142–155.  
<https://doi.org/10.26905/jpp.v5i1.4266>
- Ilham, Muttaqin, M. Z., Idris, U., & Renyaan, D. (2022). Era Digital: Influencer Dalam Sistem Politik Indonesia. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 10(1), 69–80.  
<https://doi.org/10.31957/jeb.v10i1.2317>
- Ismail, M. (2015). Strategi Pengembangan Ekonomi Rakyat di Provinsi Papua. *Jurnal Bina Praja*, 07(03), 251–259.  
<https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.251-259>
- Jokow. (2020). *Ekonomi Kerakyatan, Pancasila*. pengabdian.ugm.ac.id,  
<https://pengabdian.ugm.ac.id/2020/05/18/ekonomi-kerakyatan-pancasila/>  
 (Diakses, 3 Oktober 2022).
- Krisnamurthi, B. (2002). Strategi pembangunan ekonomi rakyat dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah. *Library of IPB University*.  
<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/45108>
- Marit, E. L. (2019). Kopi Papua: Strategi Pemberdayaan Orang Asli Papua Dalam Industri Kreatif Di Era Otsus Papua. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 22(1), 121–130.  
<https://doi.org/10.29103/e-mabis.v20i2.289>
- Mayor, R. J. (2021). *Geliat Produksi Kopi Lokal Asal Paniai Papua*. Merdeka.Com.  
<https://www.merdeka.com/peristiwa/geliat-produksi-kopi-lokal-asal-paniai-papua.html> (Diakses, 12 Agustus 2022).
- Moh Musfiq Arifqi, M. M. A. (2021). Konsep Ekonomi Kerakyataan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah Di Indonesia (Telaah Pemikiran Muhammad Hatta). *BALANCA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(20), 57-73.  
<https://doi.org/10.35905/balanca.v2i02.1554>
- Nawipa, S., Banurea, R. N., & Abidjulu, F. C. (2022). Implementation of the Return to Village Policy Through the Coffee Farmer Program for Community Empowerment in Paniai Regency. *Jurnal Multidisiplin Madani (Mudima)*, 2(4), 1869–1882.
- Ohee, V. (2021). *Menteri Koperasi dan Bupati Paniai Sepakat Bangun Koperasi Induk, Kopi Mepago Siap Menduni*. Nokenlive.com.  
<https://www.nokenlive.com/2021/06/23/menteri-koperasi-dan-bupati-paniai-sepakat-bangun-koperasi-induk-kopi-mepago-siap-mendunia/> (Diakses, 12 Agustus 2022).
- Pademme, A. (2021). *Rencana Pendirian Pabrik Kopi di Paniai*. Kbr.id.  
[https://kbr.id/nusantara/08-2021/rencana\\_pendirian\\_pabrik\\_kopi\\_di\\_paniai/106198.html](https://kbr.id/nusantara/08-2021/rencana_pendirian_pabrik_kopi_di_paniai/106198.html) (Diakses, 13 Agustus 2022).
- Papua.go.id. (2019). *Gerakan Tanam Kopi di Paniai Diapresiasi*. Papua.go.id.  
<https://www.papua.go.id/view-detail-berita-6409/gerakan-tanam-kopi-di-paniai-diapresiasi.html> (Diakses, 13 Agustus 2022)
- Pigai, H. H. (2019). *Pelibatan multipihak dalam gerakan pengembangan Kopi di Paniai patut diapresiasi*. Yapkema.org.  
<https://yapkema.org/pelembatan-multipihak-dalam-gerakan-pengembangan-kopi-di-paniai-patut-diapresiasi/> (Diakses, 12 Agustus 2022).
- Pringgar, R. F. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa. *Jurnal IT-EDU*, 5 (1), 317-329.
- Rahardjo, Dawam. (2004). *Ekonomi Pancasila Dalam Tinjauan Filsafat Ilmu*. Pustek Universitas Gadjah Mada,  
<https://ekonomikerakyataan.ugm.ac.id/publikasi/ekonomi/pancasila-dalam-tinjauan-filsafat-ilmu/> (Diakses, 3 Oktober 2022)
- Sabil. (2014). Sistem Ekonomi Kerakyatan Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Ukm, Koperasi Dan

- Pemerintah Daerah. *MONETER*, 1(1), 51–57.
- Sarwan, T. (2020). *Kopi Paniai, Emas Merah Penyambung Kehidupan*. Econusa.id. <https://econusa.id/id/ecoblog/kopi-paniai-emas-merah-penyambung-kehidupan/> (Diakses, 11 Agustus 2022).
- Sarwan, T., & Prasetyo, V. (2020). *Selayang Pandang Kopi Paniai*. Econusa.id. <https://econusa.id/id/ecoblog/selayang-pandang-kopi-paniai/> (Diakses, 12 Agustus 2022).
- Sulastri, R. E., & Dilastri, N. (2015). Peran Pemerintah Dan Akademisi Dalam Memajukan Industri Kreatif Kasus Pada UKM Kerajinan Sulaman Di Kota Pariaman. *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, c, 87–94.
- Suma, Amin. (2014). Ekonomi Kerakyatan Dalam Perspektif Agama Islam. Dalam : Ridwan M, editor. *Ekonomi Kerakyatan*. Lembaga Suluh Nusantara Bekerjasama dengan American Institute For Indonesian Studies (AIFIS).
- Sunarti, N. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan. In *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* (Vol. 2, Issue 2, pp. 789–796).
- Sururi, A. (2016). Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual Dan Empiris). *Jurnal Sawala*, 4(3), 1689–1699.
- You, M. (2021). *Yapkema Terus Membumikan Gerakan Tanam Kopi, Sosialisasikan di Dua Kawasan*. Baca.co.id. <https://berita.baca.co.id/66351390?origin=relative&pageId=85a34fe8-7d4d-4d64-84d6-3f3542337597&PageIndex=1> (Diakses, 13 Agustus 2022).
- Yumai, J. (2021). *Bupati Paniai: Produk Lokal Koperasi Akan Dipasarkan Secara Nasional & Internasional*. Papualives.com. <https://www.papualives.com/bupati-paniai-utus-4-pengurus-koperasi-ikut-pelatihan-penyusunan-bisnis-plan/> (Diakses, 13 Agustus 2022).